

LAPORAN KINERJA (LKJ) TRIWULAN II

KECAMATAN TOMONI TAHUN 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I_PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi SKPD	2
1.4 Isu Strategis	20
1.5 Keadaan Pegawai	22
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana	23
BAB II_PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Perencanaan Strategis	25
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	25
2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	27
2.1.3 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	28
2.2 Indikator Kinerja Utama	31
2.3 Perjanjian Kinerja	35
BAB IV_AKUNTABILITAS KINERJA.....	42
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	42
3.2 Realisasi Anggaran	51
BAB V_PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	22
Tabel 1.2 Data Pegawai Yang Sudah Melaksanakan Diklatpim.....	22
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon	23
Tabel 1.5 Jumlah Sarana dan Prasarana.....	24
Tabel 2.1 Visi Misi RPJMD 2021-2026	26
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Tomoni.....	27
Tabel 2.3 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Tomoni.....	28
Tabel 2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran	29
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama.....	33
Tabel 2.6 Formulasi Penghitungan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tomoni.....	34
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Tahun 2025	35
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran per Kegiatan s/d TW II Tahun 2025.....	37
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2025 (Sasaran I).	43
Tabel 3.2 Perbandingan dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	43
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya (Sasaran II).....	48
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	57

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Triwulan II. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

Tomoni, 7 Juli 2025



Camat Tomoni,

MUHAMMAD JUMARDIN, SE

Pangkat : Pembina Tk.I/ IV.b

NIP : 19721231 200312 1 022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (Good Government) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Kantor Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama 1 (satu) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini juga menjadi alat kendali untuk menganalisis capaian setiap program dan kegiatan serta mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

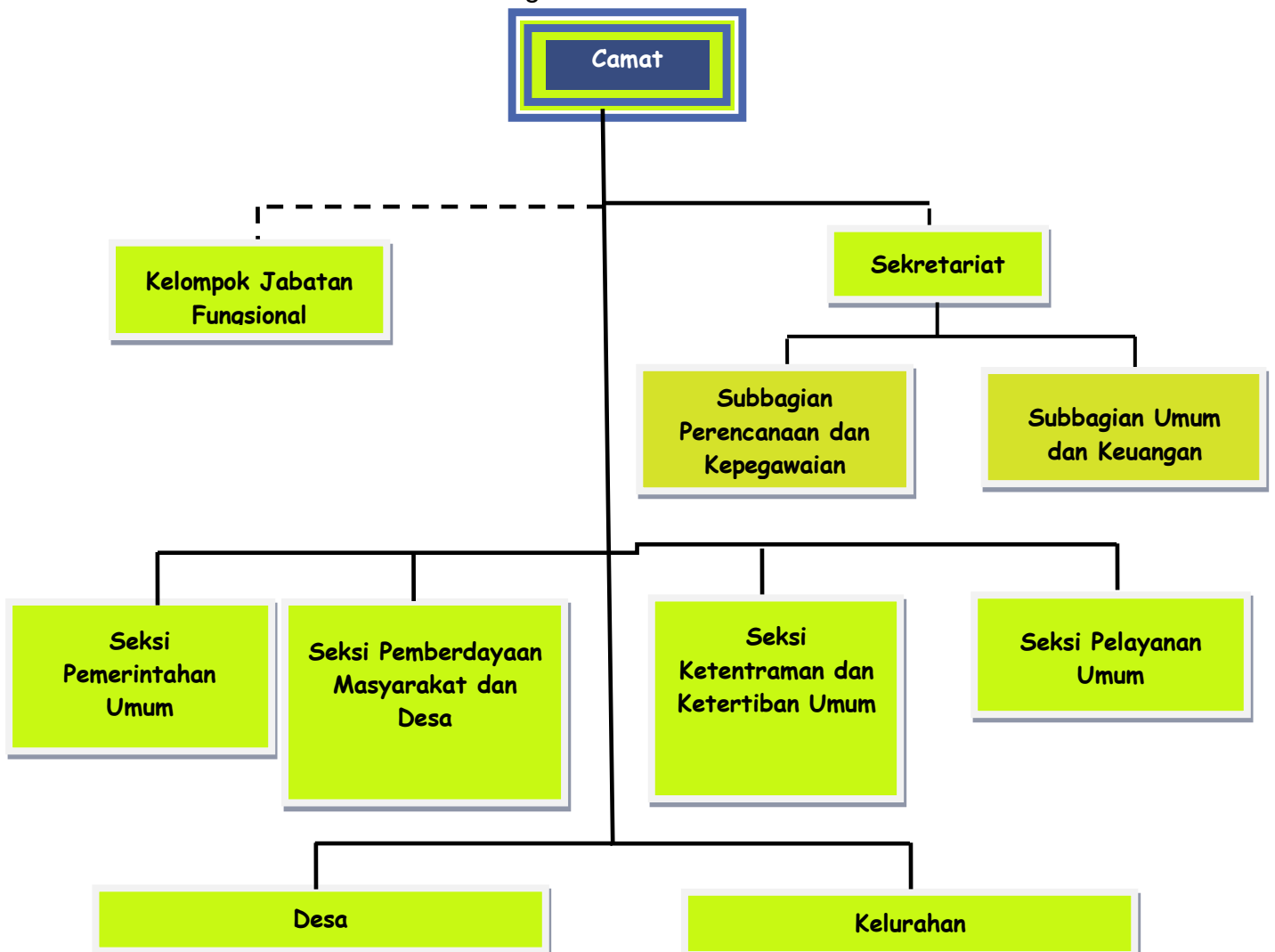
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Tomoni ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Camat Tomoni yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah

Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, struktur organisasi Kantor Kecamatan Luwu Timur, dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tomoni



Sumber: Peraturan Bupati No 56 Tahun

Sesuai Peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kasubag dan 4 (empat) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Tomoni terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kependawaian
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan
6. Seksi Pelayanan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur :

1. **Camat**; sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.

Camat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kecamatan;
- g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2. Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud apada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
 - c. Pelakasanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris Camat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi peaksanaan kegiatan;

- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatatusahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Sekretaris camat membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

1. Kepala **Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huru b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Kepala **Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Kepala **Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik kecamatan;
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis ;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- k. Menyiapkan bahan atau data perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- l. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
- m. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;

- n. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bazetting pegawai;
- r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - usul kenaikan pangkat,
 - perpindahan,
 - pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
 - kenaikan gaji berkala,
 - cuti,
 - ijin,
 - masa kerja,
 - peralihan status dan
 - layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- u. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;
- w. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

2. **Subbagian Umum dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. Mengkoordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan asset;

- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

- f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan umum pemerintah desa/kelurahan dan tugas pembantuan;
- g. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa/kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/perangkat desa/unsur staf perangkat desa;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengisian anggota badan permusyawaratan desa;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesan;
- m. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
- n. Memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan sarana dan prasarana desa/kelurahan;
- o. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa/kelurahan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- q. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa;

- s. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
 - t. Melakukan fasilitasi dan dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
 - u. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
 - v. Mengelola dan monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai boding tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala pemberdayaan masyarakat dan desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
- g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi / profil kecamatan;
- h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat/budaya pemberdayaan perempuan dengan instansi pemerintah;
- k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;

- m. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah propinsi/kabupaten;
 - n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun RPTK, daftar skala prioritas, RPJMK agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
 - o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipatif masyarakat sadaya dan gorong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar diketahui tingkat
 - p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai boding tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuda agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara RI;
- j. Menglentarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
- k. Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;

- m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
 - n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, social dan pengawasan orang/lembaga asing di wilayah kecamatan;
 - o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
 - q. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi Negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
 - r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
 - s. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan-pemilihan umum;
 - t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan dan jenis pelayanan public lainnya;
- g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan;
- h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan daam satu kabupaten;
- i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil plksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- j. Melakukan fasiltasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;

- k. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- l. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi
- m. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai boding tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4. Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tantangan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Tomoni selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah, pada Kantor Kecamatan Tomoni juga tentunya ditemukan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Tomoni dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih minim.
2. Terbatasnya anggaran yang dikelola untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
3. Koordinasi perencanaan antar SKPD/Instansi belum optimal.
4. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
5. Pemanfaatan referensi data dan informasi masih rendah.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja belum optimal.

1.5. Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai. Sistem prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni dan Kelurahan Tomoni didukung oleh 25 orang Pegawai Negeri yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang PNS serta 7 (tujuh) orang PPPK serta 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Non ASN

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Tomoni pada tahun 2025 sebanyak 25 orang yang tersebar dalam 4 (empat) golongan dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan golongan:*

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	6	5	4	3	18
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-

JUMLAH	6	6	4	9	25
--------	---	---	---	---	----

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

2. Berdasarkan Diklat Perjenjangan

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada table berikut:

Tabel 1.2
Data pegawai yang sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Diklatpim III	1	-	1
2	Diklatpim IV	7	3	4
3	Struktural yang belum diklat perjenjangan	4	3	1

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

3. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Tomoni memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat SMA/SMP hingga Strata 2 (S2). Komposisi tingkat pendidikan ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Rincian jumlah ASN menurut golongan dan jenjang pendidikan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	-	1	-	-	1
2	Golongan III	1	13	1	3	18
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-

JUMLAH	1	13	1	9	25
--------	---	----	---	---	----

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

4. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Tomoni terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Pembagian ini mencerminkan peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaran jumlah ASN menurut jabatan dan eselon disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan :

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	8	14	24
2	Fungsional	-	-	-	1	1
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	8	14	25

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

5. Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja ini terdiri atas beberapa kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga dengan status upah jasa. Komposisi ini menggambarkan keberagaman status kepegawaian yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomoni.

Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	18
2	CPNS	1
3	PTT	-
4	PPPK	6
5	UPAH JASA	10
JUMLAH		30

Sumber : Kecamatan Tomoni

1.6. Sarana dan Prasarana

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak mau pun yang tidak bergerak. tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Adapun Jumlah dan Kondisi riil Sarana dan Prasarana Kecamatan Tomoni Prasarana kerja dan pendukung lainnya, adalah sebagai berikut:

*Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana*

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Rujab	1	Baik
2.	Gedung Kantor	1	Baik
3.	Gedung Serba Guna	1	Baik
4.	Mess	1	Baik

5	Gedung/Panggung Upacara	1	Baik
6	Tanah Kantor Camat	3.745 m ²	Baik
7	Tanah Bangunan Rujab	1.295 m ²	Baik
8	Tanah Bangunan Tempat Pertemuan	408 m ²	Baik
9	Tanah Bangunan Mess	39.526 m ²	Baik
10	Tanah Lapangan Sepak Bola	800 m ²	Baik
11	Mobil	2	Baik
12	Mobil Sampah	2	Baik
13	Sepeda motor	12	Baik
14	Motor Sampah	2	Baik

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra Kecamatan Tomoni merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Tomoni dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tomoni sebagai Perangkat Daerah di Luwu Timur. Kemudian berdasarkan Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahunan Kecamatan Tomoni .. Sebagai pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Tomoni Tahun 2021 - 2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016 - 2021).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam upaya Mewujudkan Visi Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu **“Luwu Timur Berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”** maka Kantor Kecamatan Tomoni Melaksanakan Misi Ke-4 dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”** sebagai amanat bagi Kecamatan Tomoni dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Visi dan Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya Kecamatan Tomoni mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

MISI		TUJUAN		SASARAN	
VISI : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Agama dan Budaya					
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	1	Meningkatkan kualitas hidup manusia	1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat
				2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
				3	Meningkatnya kesetaraan gender
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
				2	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha
3	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan	1	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah
				2	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
				2	Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)
				3	Meningkatnya kualitas tata kelola desa
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman	1	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah	1	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)

2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah yang jelas akan memberikan Perangkat Daerah Arah Kerja yang terukur, mampu menyusun strategi dan kebijakan yang tepat, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan perangkat daerah merupakan arah atau kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (lima tahun), sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, berikut disajikan Tujuan Kecamatan Tomoni :

“Meningkatnya kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni”

Sementara itu, **sasaran perangkat daerah** adalah hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari Kecamatan Tomoni adalah Sebagai Berikut:

1. Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni.
2. Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni.

2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Perumusan program kecamatan merupakan proses menetapkan serangkaian kegiatan yang terencana dan terukur untuk mencapai sasaran pembangunan kecamatan melalui identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan kebijakan, pemilihan program dan kegiatan, penetapan indikator kinerja, serta pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Kecamatan Tomoni merumuskan program-program untuk mendukung masing-masing sasaran pada Rencana Kerja Tahunan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa
			Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
	;		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil pengukuran dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan public yang sesuai antara harapan dan kebutuhan. • Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan kategori : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak baik dengan nilai presepsi 1 • Kurang baik dengan nilai presepsi 2 • Baik dengan nilai presepsi 3 • Sangat baik dengan nilai presepsi 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public (rumah sakit) dengan pengisian kuesioner. • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan rumah 	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekcam, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Pemerintahan Umum, Kasi Trantib Kasi PMD Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Kasubag Umum dan Keuangan

			<p>sakit</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya 																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>TIDAK BAIK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00- 76,60</td> <td>C</td> <td>KURANG BAIK</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>BAIK</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324-4,00</td> <td>88,31-100,00</td> <td>A</td> <td>SANGAT BAIK</td> </tr> </tbody> </table> $\text{Perunsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi}}{\text{Total Unsur yang Terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK	
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																								
1	1,00-2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																								
2	2,60-3,064	65,00- 76,60	C	KURANG BAIK																								
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	BAIK																								
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	SANGAT BAIK																								

		$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ <p>Bobot Persepsi Tertimbang = Jumlah bobot = 1 = N</p> <p>Jumlah unsur X</p> <p>Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot = 1 = N</p> <p>Jumlah unsur x</p>		
--	--	--	--	--

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD. OPD Kecamatan Tomoni telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel. 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tomoni Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	66

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%

4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	100%
6	Meningkatnya capaian kinerja pada pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%

Pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 diatas, Camat Tomoni memperjanjikan 2 (dua) sasaran strategis dan juga 6 (enam) sasaran program yang pelaksanaannya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Sasaran strategis dan program yang di perjanjikan mengacu kepada Renstra Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Tomoni Tahun 2025. Pada perjanjian kinerja tahun 2025, sebagian besar sasaran strategis dan sasaran program yang diperjanjikan menitik beratkan pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan.

Tabel 2.3

Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,247,429,125
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5,270,000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 464,410,400
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7,780,250
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 16,742,000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11,752,900

2.6. Rencana Anggaran Kecamatan Tomoni Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kecamatan Tomoni maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan sampai dengan Triwulan II pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **1,561,636,974,-**. Jumlah anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Tomoni adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.8.
Alokasi Per-Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025*

SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU s/d TW III
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	5,270,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	5,270,000
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	24 Dokumen	5,270,000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	464,410,400
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	84,450,050
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Masyarakat	15,666,500
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Laporan	68,783,550

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	379,960,350
	Pembangunan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	339,510,350
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 Pokmas	40,450,000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	7,780,250
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	6,240,750
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2,470,000
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	12 Laporan	3,770,750
	Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	1,539,500
	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	1,539,500
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	16,742,000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	16,742,000
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	16,742,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11,752,900
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	11,752,900

	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	3,828,500
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7,924,400
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,247,429,125
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17,203,650
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	10,696,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,680,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,857,650
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,970,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,952,808,963
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	2,923,864,963
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	28,944,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	17,401,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	17,401,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	32,082,000

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	2,286,000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	29,796,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	338,633,700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	5,917,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	4,765,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	12,229,700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Dokumen	8,040,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	157,680,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978 Laporan	150,002,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	38,000,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	38,000,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	668,859,812
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,582,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	50,017,812
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	8,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Orang	584,760,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	185,440,000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	127,450,000
	Pemeliharaan Mebel	10 Unit	1,200,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	13,550,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	43,240,000
	JUMLAH	100%	4,753,384,675

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) semester yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2025 Triwulan II. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II.

Laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Tomoni Triwulan II memberi gambaran penilaian mengenai tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Kecamatan Tomoni. Setiap indikator mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Data capaian diperoleh dari laporan kinerja, hasil monitoring Dan evaluasi, serta sumber data pendukung lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengukuran capaian kinerja ini, Kecamatan Tomoni dapat menilai

tingkat pencapaian sasaran strategis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kinerja di masa mendatang serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tomoni diperoleh dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Nilai Angka	Predikat	Keterangan
1	>90	AA	Sangat Memuaskan – kinerja melampaui target, efektif, efisien, dan inovatif
2	>80-90	A	Memuaskan – kinerja mencapai target dengan efektivitas dan efisiensi baik
3	>70-80	BB	Baik – sebagian besar target tercapai, masih ada ruang perbaikan
4	>50-60	B	Cukup – target tercapai secara minimal, efektivitas dan efisiensi terbatas
5	>30-50	C	Kurang – sebagian besar target tidak tercapai, kinerja belum optimal
6	0-30	D	Sangat Kurang – kinerja jauh di bawah target, tidak efektif dan tidak efisien

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antara target dan realisasi, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendukung maupun hambatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Tomoni Pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II TAHUN 2025	CAPAIAN (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90,19	106%	Lebih dari target
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP Kecamatan Tomoni	65	68,80	105%	Lebih dari target

Sumber:Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025, selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Kecamatan Tomoni. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut.

Melalui analisis capaian kinerja ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tomoni dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil analisis ini juga menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada

triwulan berikutnya, guna memastikan target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

3.2.1 Capaian Sasaran Strategis I

“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni”

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, yang mendukung sasaran strategis dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran penilaian IKM melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pelayanan merupakan timbal balik atau *outcome* dari pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni.

Tabel 3.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dan Triwulan II 2025:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2025	Realisasi pada TW II 2025
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,56	107%	85	90,19

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKM sampai dengan triwulan II Tahun 2025 menunjukkan trend yang positif bahkan sudah melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tomoni, dapat dinyatakan bahwa kepuasan masyarakat telah sesuai bahkan melebihi ekspektasi/target. Namun perlu disampaikan bahwa capaian kinerja mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian terhadap sistem perhitungan IKM di tahun 2025 sehingga capaian menjadi lebih realistis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2023	2023	2024	2024	2025	TW II 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	130,11	83	89,56	85	90,19

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah 2025

Pada table diatas dapat dilihat perbandingan target dan realisasi capaian IKM dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui bimtek, Menyiapkan sarana dan prasarana, Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam RENSTRA

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Tomoni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 dengan target akhir
RENSTRA Kantor Kecamatan Tomoni 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90,19	85

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi pada triwulan II Tahun 2025 adalah **90.19** dengan Predikat **“Memuaskan”**. Target Nilai IKM Pada akhir Periode Renstra 2021-2026 adalah 85. Jika Nilai IKM Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan Target akhir Renstra, maka Persentase capaiannya sebesar 106%. Realisasi ini sudah sangat melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk itu diharapkan upaya yang lebih maksimal dari Aparat Kantor Kecamatan Tomoni untuk meningkatkan semua potensi yang mendukung tercapainya target indikator tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan SDM petugas pelayanan melalui bimtek, Menyiapkan sarana dan prasarana, Membuat spanduk/papan informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan baik perizinan maupun non perizinan.

4. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni terdapat beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab keberhasilan
 - **Banyaknya program dan kegiatan yang bersifat objektif** terhadap pelayanan kepada masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum
 - **Peran aktif seluruh pegawai kantor kecamatan tomoni** dalam pelayanan yang optimal dapat mewujudkan tercapaiannya target sasaran yang telah ditentukan.
 - **Tingginya komitmen aparatur kecamatan** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pelayanan administrasi, yang meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu penyelesaian layanan.
- b. Faktor penyebab kegagalan
 - **Keterbatasan sumber daya manusia**, terutama pada kegiatan yang membutuhkan tenaga teknis atau administrasi tambahan .
 - Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan sudah optimal namun **indikator kinerja utama sasaran kurang menjadi perhatian** yaitu penilaian melalui kuesioner. Pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan melalui pengisian kuesioner bukan menjadi standar operational prosedur (SOP) setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - **Standar operational prosedur (SOP) yang belum tersusun** akibat perubahan peraturan mendasar terhadap setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
- c. Alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - Kantor Kecamatan Tomoni melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung terhadap upaya mewujudkan sasaran Kantor Kecamatan Tomoni agar tercapai.
 - Menggunakan standar operasional prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Tomoni.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Anggaran

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni untuk 5 (lima) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan adalah sebesar Rp.454.773.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.455.422 atau setara 35,94%. Realisasi keuangan masih relative rendah disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden.

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KEMAMPUAN PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90,19	106%	Rp. 454.773.100	Rp.163.455.422	35,94%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100%	50%	50%	Rp. 5.270.000	Rp.190.000	3,61%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	68,81%	68,81%	Rp. 464.410.400	Rp. 152.130.422	32,76%

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Kelurahan(%)						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	43,75%	43,75%	Rp.7,780,250	Rp. 400.000	5,14%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang berjalan sesuai standar (%)	100%	50%	50%	Rp.16,742,000	Rp. 5.800.000	34,64%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	58%	58%	Rp.11.752.900	Rp. 1.535.000	13,06%

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan indicator indeks keppuasan masyarakat pada triwulan II sebesar 106% dengan penyerapan anggaran sebesar 35,94%, sehingga presentase efisiensi biaya adalah 64,06%. Nilai presentase efisiensi biaya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$$

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah meningkatnya capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu ***persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik***, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **50%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Adapun formulasi perhitungan capaian kinerja program ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang dicapai pada periode pelaporan dengan target kinerja yang telah direncanakan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1

sub kegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	50%	50%
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	50%	50%
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24 Lap	12 Lap	50%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik



Pengurusan Dokumen Penduduk Pindah Datang

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran dari Program ini adalah Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Hasil Pengukuran keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator kinerjanya yaitu : ***Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar*** ,dengan target kinerja sebesar 100% tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai **68,81%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Pada tahun 2025 Pencapaian Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 4 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8 Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW III	Capaian
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar	100%	69%	69%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	63%	63%
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	100%
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	100%	75%	75%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat	2 pokmas	0 pokmas	100%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



Musrenbang tingkat Kecamatan Tomoni



Rapat Rutin PKK Kecamatan Tomoni

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran dari **Program Koordinasi dan Ketertiban Umum** adalah Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja, yaitu Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang Berjalan Sesuai Standar**, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **43,75%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan

dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 subkegiatan, adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9 Pencapaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar	100%	43,75%	43,75%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	45,83%	45,83%
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	5 Lap	41,67%
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	6 kali	50%
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100%	66,67%	63%
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Lap	5 Lap	41%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

Sasaran dari **Program** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu **Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar**, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang diperoleh baru mencapai **50%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentas capaian Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar	100%	50%	50%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	50%	50%
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Lap	6 Lap	50%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Musdes RKPdes tahun 2026 Desa Mandiri

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

Sasaran dari **Program** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah Meningkatkan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum. Ukuran keberhasilan program ini ditunjukkan melalui **indikator kinerja**, yaitu **Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar**, dengan target kinerja sebesar **100%** pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja hingga Triwulan II Tahun 2025, capaian yang telah mencapai **58%** dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program ini masih berada pada tahap pelaksanaan tahun berjalan, sehingga hasil capaian belum sepenuhnya terealisasi.

Pada tahun 2025 Pencapaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **dilaksanakan** melalui 1 kegiatan dan 1 subkegiatan , adapun capaian kinerja Kegiatan/Subkegiatan pada triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11 Pencapaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II	Capaian
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar	100%	58%	58%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi,Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	66,67%	66,67%
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Lap	24 Lap	67%
2.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan	Jumlah Kawasan Pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	12 lap	3lap	40%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Dokumentasi Kegiatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Sosialisasi dan Advokasi Kebencanaan



Monev Dana BKK Desa

3.2.2 Capaian Sasaran Strategis II

“Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni”

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”, dan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan

Tomoni yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) **indikator kinerja** yaitu **Nilai AKIP Kecamatan Tomoni** dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Triwulan II Pada Tahun 2025

Formulasi indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian target adalah **“Nilai AKIP berdasarkan LHE Inspektorat”**. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **65 (kategori B)**. Namun, nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan realisasi akhir Tahun 2025 karena proses penilaian AKIP dilaksanakan pada awal tahun 2026. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan menggunakan **realisasi Nilai AKIP Triwulan I Tahun 2025**.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat pada **Triwulan I Tahun 2025**, diperoleh nilai **68,75 (kategori B)**. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni	Nilai AKIP Kecamatan Tomoni	65	68,75	105%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP Kecamatan Tomon	2022	63	72,45	146%
		2023	64	75,75	160%
		2024	65	68,08	107%
		2025 (Tw I)	65	68,75	105%

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Berdasarkan **Tabel** di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian **Nilai AKIP Kecamatan Tomoni** mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada **Tahun 2022**, target yang ditetapkan sebesar **63**, dengan realisasi **72,45**, sehingga capaian kinerjanya mencapai **146%**. Kinerja meningkat pada **Tahun 2023**, dari target 64 dengan realisasi sebesar **75,75**, capaian kinerja tercatat **160%**. Selanjutnya pada **Tahun 2024**, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya namun tetap melebihi target, di mana realisasi menjadi 68,08 dari target **65**, dengan capaian kinerja sebesar **107%**. Pada **Tahun 2025**, target dinaikkan menjadi **65**, realisasi sementara telah mencapai **68,75**, sehingga capaian kinerja berada di angka **105%**.

Nilai capaian tahun 2025 tersebut masih bersifat sementara karena proses penilaian AKIP oleh Inspektorat belum dilakukan secara menyeluruh dan baru berdasarkan hasil **LHE Inspektorat Triwulan I Tahun 2025**. Namun demikian, tren peningkatan target setiap tahunnya menunjukkan adanya **komitmen Kecamatan Tomoni untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja**, sehingga diharapkan nilai AKIP Tahun 2025 dapat meningkat setelah dilakukan penilaian secara penuh oleh Inspektorat pada tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 terhadap Target jangka menengah RENSTRA Kantor Kecamatan Tomoni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA Kantor Kecamatan Tomoni 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi s.d TW II 2025	Target Akhir Periode RENSTRA
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni	Nilai AKIP Kecamatan Tomoni	65	68,75	65

Sumber: Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja sampai dengan **Triwulan III Tahun 2025** menunjukkan nilai **68,75 (B)**, yang berarti **telah melebihi capaian target jangka menengah**. Kondisi ini dianggap cukup baik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain **ASN tertib melakukan penginputan SKP, Dokumen Pelaporan Kinerja yang masih banyak butuh perbaikan, serta rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti**. Nilai tersebut masih merupakan **hasil penilaian sementara (triwulanan)** dan **dapat mengalami perubahan** setelah pelaksanaan **penilaian AKIP tahunan** oleh **Tim Evaluator Inspektorat** pada awal tahun berikutnya.

4. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2023	2023	2024	2024	2025	2025
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	64	75,75	65	68,08	65	68,75

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan TREND yang positif, namun masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan capaian nilai SAKIP pada tahun berikutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni terdapat beberapa faktor dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan menghambat keberhasilan sasaran yaitu sebagai berikut:

a. Faktor penyebab keberhasilan

- 1) Kesadaran seluruh jajaran Kantor Kecamatan Tomoni akan mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni sebagai wujud efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Perbaikan dan tindaklanjut hasil evaluasi internal berjenjang oleh pimpinan ke bawahan yang telah diterapkan pada Kantor Kecamatan Tomoni.
- 3) Komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung implementasi akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- 4) Tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
- 5) Adanya upaya perbaikan melalui evaluasi internal, meskipun belum optimal, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja organisasi.

b. Faktor penyebab kegagalan

- 1) Belum pahamnya beberapa aparatur sipil negara akan pentingnya pencapaian tujuan dan sasaran pada Kantor Kecamatan Tomoni.

- 2) Aspek Perencanaan: Dokumen perencanaan belum dilengkapi lampiran penjelasan indikator; Kepala Seksi dan staf belum mampu membedakan indikator dan rencana aksi; serta terdapat ASN yang belum membuat SKP.
 - 3) Aspek Pengukuran: Belum ada evaluasi kinerja berkala oleh Camat; tidak terdapat bukti keterlibatan pimpinan dalam pengukuran kinerja; dan dokumentasi pencapaian kinerja belum berjalan.
 - 4) Aspek Pelaporan: Laporan kinerja belum informatif dan tidak mencantumkan rekomendasi perbaikan.
 - 5) Aspek Evaluasi: Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan sepenuhnya dan tindak lanjut rekomendasi belum dilaksanakan secara menyeluruh
- c. Alternatif Solusi yang telah dilakukan
- 1) Melakukan pengarahan dan pemberitahuan kepada aparatur sipil negara yang belum paham terhadap pentingnya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Tomoni secara persuasif.
 - 2) Peningkatan Kapasitas ASN: Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar seluruh pegawai memahami indikator, target, dan rencana aksi.
 - 3) Penguatan Evaluasi Internal: Melaksanakan rekomendasi perbaikan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - 4) Peningkatan Keterlibatan Pimpinan: Menetapkan jadwal rapat kinerja secara berkala dengan notulen dan bukti dukung untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
 - 5) Perbaikan Dokumen Pelaporan: Menyusun laporan yang lebih informatif, memuat analisis capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan secara lengkap serta memublikasikannya melalui Website PPID.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan adalah sebesar Rp. **2.782.304.334** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **1.845.707.074** dengan capaian **66,34%**, Capaian keuangan masih relatif kurang disebabkan karena masih ada kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya baik dari proses pertanggungjawaban maupun terhambatnya proses pengadaan karena proses pembuatan e-katalog.

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran s.d Triwulan II 2025	Realisasi s.d Triwulan II 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TOMONI	Nilai AKIP Kecamatan Tomoni	65	68,75	105%	Rp. 2.782.304.334	Rp. 1.845.707.074	66,34%

Sumber : Kecamatan Tomoni, data diolah tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, indikator **Nilai AKIP Kecamatan Tomoni** menunjukkan tingkat capaian sebesar **105%**, dengan **realisasi anggaran sebesar 66,34%** dari total alokasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya **korelasi capaian kinerja yang lebih tinggi dari tingkat realisasi anggaran**, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan **cukup efisien**.

Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dari selisih antara alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right) \times 100\%$$

$$\textit{Presentase Efisiensi Biaya} = 100\% - 66,34\% = 33,66\%$$

Berdasarkan data yang ada, diperoleh **tingkat efisiensi biaya sebesar 33,66%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran Kecamatan Tomoni pada Triwulan II Tahun 2025 tergolong efisien**, karena meskipun realisasi anggaran baru mencapai 66,34%, namun capaian nilai AKIP melebihi target, yaitu sebesar 105 %. Hal ini mencerminkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi sumber daya.

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian Keuangan
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase Kegiatan penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	78,10%	33,80%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan baik	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	67,50%	67,50%	28,83%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok (50%)	31,69%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok (50%)	23,21%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD		Jumlah dokumen DKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD (Dokumen)	2 Dok	1 Dok	1 Dok (50%)	10,23%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	5 Lap	3 Lap	3 Lap (60%)	33,33%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	51,17%	26,69%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	25 Org/Bln	25 Org/Bln	25 Org/Bln	36,53%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian Keuangan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD (Laporan)	19 Lap	8 Lap	8 Lap	29,44%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi BMD yang diadministrasikan tepat waktu	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	50%	50%	23,27%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4 Lap	4 Lap	1 Lap	23,27%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan baik	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50%	50%	50%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	10 Lap	5 Lap	5 Lap	35,15%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	8 Org	2 Org	2 Org	26%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	59%	59%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	2 Paket	2 Paket	31,13%
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	1 Paket	1 Paket	19,94%
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	3 Paket	2 Paket	2 Paket	66,67%
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian Keuangan
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Laporan)	12 Lap	6 La	6 Lap	50%
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	978 Lap	259 Lap	259 Lap	26,48%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya BMD perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	25%	25%	25%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	4 Unit	1 Unit	1 Unit	25%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	43,75%	43,75%	43,75%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12 Lap	6 Lap	6 Lap	50%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	36 Lap	18 Lap	18 Lap	50%
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	4 Lap	1 Lap	1 Lap	25%
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	24 Lap	24 Lap	24 Lap	100%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	16,67%	16,67%	16,67%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya (Unit)	12 Unit	1 Unit	1 Unit	8,33%
1.8	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	-	-	-
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	21 Unit	2 Unit	2 unit	5,13%
1.8.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2 Unit	1 Unit	1 unit	50%

Secara umum, pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** pada Triwulan II Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **78,10%** dan penyerapan anggaran mencapai **33,80%**. Sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai rencana, termasuk beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya berada pada kisaran **50%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah **sesuai dengan target Triwulan II** dan akan dilanjutkan pada periode berikutnya untuk mencapai target tahunan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dengan capaian di bawah target, seperti **penyediaan peralatan dan mesin** yang realisasinya masih 25% karena proses pengadaan masih berlangsung dan dijadwalkan selesai pada **Triwulan IV Tahun 2025**. Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja, Kecamatan Tomoni akan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi antar bidang, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi agar seluruh sasaran program dapat tercapai secara maksimal pada akhir tahun anggaran

KESIMPULAN

- Capaian kinerja pada sasaran **“Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Tomoni”** pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil sebesar **105%**, yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan formulasi indikator kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \\ &= \frac{68,75}{65} \times 100 \\ &= 105\% \end{aligned}$$

- Dalam mencapai sasaran kinerja, Kecamatan Tomoni didukung oleh **alokasi anggaran** yang telah direncanakan dalam **DPA-SKPD Kecamatan Tomoni** hingga **Triwulan II Tahun Anggaran 2025** sebesar **Rp. 2.782.304.334,-**, dengan **realisasi keuangan** yang telah terserap sebesar **Rp. 1.845.707.074,-** atau **66,34%** dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.18 Permasalahan Dan Solusi Terkait Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
	KECAMATAN TOMONI			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen pada TW II	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II mencapai 31,69 % kurang dari target masih menunggu jadwal kegiatan terkait penyusunan dokumen perencanaan	Pada Sub Kegiatan ini realisasi Keuangan sebesar 31,69 % realisasi akan dilakukan menunggu jadwal kegiatan yang akan dilakukan bulan depan
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja telah terealisasi sebesar 50% atau 1 dokumen dari target 2 dokumen	Pada Sub Kegiatan ini Realisasi Keuangannya masih 23% dikarenakan pada Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada IV	Untuk Sub Kegiatan ini telah dianggarkan seperti tahun-tahun sebelumnya tapi pada tahun ini kegiatan yang berhubungan pada sub Kegiatan ini sangat minim jadi pada Sub Kegiatan sudah berjalan normal dikarenakan kinerja pada sub Kegiatan ini tetap tercapai
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pada Sub Kegiatan ini Target Kinerja 2 Dokumen dan telah terealisasi 1 Dokumen pada TW I s/d TW II	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II mencapai 10,23% dan adapun tingkat penyerapan anggaran	Untuk Sub Kegiatan ini realisasi Kinerja dan Keuangannya pada TW II dan TW IV mengingat

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
			Kas yang rendah oleh karena adanya efisiensi	pelksanakan kegitannya di anggrakan pada TW tersebut
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target Kinerja Pada TW II di Sub Kegiatan ini terelalisasi sebanyak 3 Dokumenn dari target 5 dokumen	Pada Sub Kegiatan ini Realisasi Keungan baru mencapai 33% dan adapun belanja sudah terealisasi tapi belum di GU	Pada Sub Kegiatan ini Kegiatan yang sudah di SPJ Kan akan di GU kan di bulan berikutnya
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjanganya terbayarkan. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada Triwulan III 25 orang/Bulan tererealisasi sebanyak 25 orang/Bulan	Target keuangan dan target kinerja pada sub kegiatan ini mencapai target berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 2.923.864.963,- realisasi Rp. 1.068.133.368,- atau 36,53%.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS Pada Triwulan II adapun untuk mengefisienkan anggaran maka gaji dihitung dengan tepat
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target kinerjanya tercapai sesuai target kinerja	Target keuangan pada sub kegiatan ini mencapai target berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 28.944.000,- realisasi Rp. 8.520.000,- atau 29,44%. Adapun capaian realisasi yang masih minim karena anggaran akan digunakan pada bulan berikutnya	Capaian realisasi sub kegiatan akan terealisasi pada triwulan IV

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada Triwulan III adalah 19 Laporan tererealisasi sebanyak 8 Laporan. .		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator kinerja pada Sub kegiatan Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu Target kerjanya tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja Triwulan III adalah 4 Laporan tererealisasi sebanyak 1 Laporan. .	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran pada TW II sebesar Rp. 17.401.000,- realisasi Rp. 4.050.000,- atau 23,27%.	Realisasi kinerja dan keuangan pada sub kegiatan ini sedang berjalan dan akan di SPJ kan pada bulan berikutnya
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target Kinerja sudah Tercapai sebanyak 5 dokumen dari target 10 dokumen. Capaian tersebut disesbkan beberapa kegiatan	Pada Sub Kegiatan ini realisasi Keuangan telah mencapai 35,15% dan sisa dari anggaran pada kegiatan masih menunggu jadwal kegiatan berikutnya	Adapun Sisa dari anggaran pada sub kegiatan ini akan digunakan pada bulan berikutnya guna

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		kepegawaian yang belum terlaksana menunggu jadwal berikut		memaksimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pada Sub Kegiatan Ini target kinerja telah terealisasi sebanyak 2 orang dari target 8 orang	Pada Sub Kegiatan Ini realisasi Keuangan 26,04% dan adapun kegiatan Bimtek yang telah dilaksanakan hanya menggunakan anggaran pada Perjalanan Dinas dikarenakan Biaya Kontribusi di bebaskan pada BKPSDM	Adapun Target Kinerja dan Keuangan pada Sub Kegiatan ini masih menunggu Jadwal kegiatan Berikutnya
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Komponen Instansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 4 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 4 paket	Target keuangan pada sub kegiatan ini telah mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS sebesar Rp. 5.917.000,- realisasi Rp. 1.842.000,- atau 31,13%.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya beberapa kegiatan yang menggunakan komponen instalasi listrik
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		(paket). Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 2 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 1 paket	sebesar Rp. 4.765.000,- realisasi Rp. 950.000,- atau 19,94%.	dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggran KAS. Salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini karena adanya kebutuhan logistik kantor sangat vital dalam menunjang kebersihan lingkungan kantor Camat Tomoni. Adapun realisasi akan dimaksimalkan pada bulan berikutnya
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket). Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 3 Paket. dan realisasi kerja sebanyak 2 paket	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 12.229.700,- realisasi Rp. 1.807.900,- atau 14,78 %.. belum maksimalnya penyediaan kebutuhan kantor ATK, belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran kas,	Target kinerja pada sub kegiatan ini sudah terealisasi sepenuhnya meskipun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah yang akan dimaksimalkan di bulan berikutnya, melakukan inventarisasi kebutuhan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan. Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kinerja
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen) . Target	Target keuangan pada sub kegiatan ini telah mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 8.040.000,- realisasi Rp. 2.020.000,- atau 25,12%.	Target kinerja dan target keuangan pada sub kegiatan ini telah tercapai dan akan dimaksimalkan di bulan berikutnya pada triwulan IV

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		Sub kegiatan ini telah tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja 8 Dokumen dan realisasi kerja sebanyak 5 Dokumen.		
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW III 12 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini telah mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 157.680.000,- realisasi Rp. 56.808.000,- atau 36,03 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rapat dan makanan dan minuman tamu
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan) . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan	Target keuangan pada sub kegiatan ini telah mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp.150.002.000,- realisasi Rp. 43.003.600,- atau 28,67%.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS, salah satu faktor mendukung tercapainya sub kegiatan ini ketersediaan anggaran untuk

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		Tomoni dengan target kinerja pada TW III 978 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 259 Laporan		mendukung pelaksanaan rapat termasuk biaya operasional,fasilitasi dan transportasi
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan (unit) . Target Sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 4 Unit. Dan belum ada realisasi yang dilakukan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II karena belum ada kegiatan pengadaamn yang dilakukan	Belanja modal pengadaan barang dan jasa sementara proses ekatalog dan realisasi akan dilakukan berikutnya
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 22.582.000,- realisasi Rp. ,- atau 5.818.500 atau 25,77%	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggran KAS pada TW III

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 12 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 6 Laporan		
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW III 36 Laporan. dan realisasi kerja sebanyak 18 Laporan	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 50.017.012,- realisasi Rp.14.467.757,- atau 28,93 %.	Target kinerja dan keuangan sub kegiatan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS pada TW III salah faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi kinerja dan keuangan adalah realisasi sesuai dengan kebutuhan atau pemakaian daya listrik yang digunakan. Belanja pembayaran listrik sesuai dengan jumlah pemakaian listrik setiap bualnya
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 8.500.000- realisasi Rp.8.400.000- atau 98,82 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggaran KAS pada TW II

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 4 Laporan dan realisasi kerja sebanyak 1 Laporan.		
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan . Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 24 Laporan dan realisasi kerja sebanyak 24 Laporan.	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 584.760.000,- realisasi Rp. 189.550.000- atau 32,42 %.	Capaian target keuangan dimaksimalkan dari pada target yang telah ditetapkan pada anggaran KAS pada TW II pembayaran honorarium upah jasa dibayarkan pada bulan berikutnya
1.8	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 127.450.000,- realisasi Rp. 13.076.860- atau 10,26 %.	Anggaran pada sub kegiatan ini akan digunakan untuk bulan berikutnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
		SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW III 12 Unit dan realisasi kerja sebanyak 1 Unit		
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 39 Unit dan realisasi kerja sebanyak 2 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW II sebesar Rp. 13.550.000,- realisasi Rp.1.680.000-- atau 12,4%.	Target keuangan sub kegiatan ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggran KAS pada TW II. Kebutuhan pemeliharaan alat kantor akan dibutuhkan setiap bulannya mengingat mobilitas pegawai yang setiap harinya menggunakan fasilitas kantor
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi. Target Sub kegiatan ini tercapai sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dengan target kinerja pada TW II 4 Unit dan realisasi kerja sebanyak 1 Unit	Target keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan berdasarkan anggaran KAS pada TW III sebesar Rp. 43.240.000,- realisasi Rp.2.060.000- atau 4,76 %.	Target kinerja dan target keuangan sub kegiatan ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen DPA SKPD Kecamatan Tomoni dan anggran KAS pada TW II

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>			
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Pada subKegiatan ini Traget Kinerja sebesar 24 laporan telah terealisasi sebanyak 12 laporan	Realisasi Keuangan Pada Sub kegiatan ini Sebesar 3,61% Dan Semua Belanja Pada Sub Kegiatan di Mana Anggaran Sebagian Telah Berkurang Setelah Perubahan. Realisasi sebsesar Rp 190.000,- dengan target keuangan sebesar Rp. 5.270.000,-	Untuk Anggaran Sub Kegiatan Ini Akan di Optimalkan di TW Berikutnya,Mengingat Terkait Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Telah Berkurang dari Yang di Anggarkan pada Tahun Berikutnya.
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja sebanyak 5 lembaga kemasyarakatan dengan realisasi sama setiap tw. Realisasi sebesar 100% atau sama setiap tw. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan musrenbang.	Pada Sub kegiatan Musrenbang realisasi keuangan mencapai 84,22% setiap tw, capaian tersebut dimaksudkan untuk melakukan penganggaran dengan berfokus pada prioritas kegiatan	Pada Sub Kegiatan ini sudah terlaksana dikarenakan kinerja pada sub kegiatan ini tercapai. Memberi porsi bagi perempuan dalam menyampaikan usulan. Indicator yang mempengaruhi keberhasilan yairu meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
				musrenbang dan menyampaikan usulan program/kegiatan. Meningkatnya pembinaan terhadap TP. PKK Desa/Kelurahan
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan ini target Kinerja 13 Laporan dan tercapai dengan 13 laporan menunjukkan jumlah kader PKK yang dibina setiap triwulan. Terbatasnya anggaran kegiatan pembinaan PKK Desa/Kelurahan	Pada Sub kegiatan ini realisasi keuangan mencapai 16,44 %, terkait realisasi keuangan kurang pada triwulan II. target ditetapkan sebesar Rp. 68.783.550,- dengan realisasi Rp. 11.307.500,- realisasi keuangan masih rendah karena terdapat beberapa kegiatan yang belum di GU kan	Kegiatan mencapai target, masih ada SPJ kegiatan yang belum di GU kan, sehingga realisasi keuangan hanya mencapai 16,44% di triwulan II. Menambah anggaran kegiatan pembinaan PKK Desa
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pada sub kegiatan ini target sarana prasarana dibangun sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi sebesar 100%	Target keuangan sebesar Rp. 339.510.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.028.422,- atau sebesar 33,59% menunjukkan bahwa pada triwulan II telah terealisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan.	Anggaran pada sub kegiatan ini telah dimaksimalkan dengan sangat baik, sisa anggaran akan digunakan untuk bulan berikutnya. Kegiatan masih berproses dan sisa anggaran untuk bulan berikutnya
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pada sub kegiatan ini memiliki target 2 pokmas/ormas pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang setiap triwulannya direalisasikan	Target keuangan sebesar 40.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.600.000,- atau 33,62% menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan di kelurahan telah dilakukan dengan baik.	Sisa pagu anggaran akan digunakan untuk kegiatan bulan berikutnya dan penyampaian pelaporan SPJ dapat lebih maksimal.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
4.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum</i>			
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 12 Laporan dengan Capaian , dan telah tercapai 5 Laporan dengan capaian kinerja 41%	Realisasi Keuangan sub kegiatan ini pada TW II belum ada pada belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat, pada kenyataannya pada Tahun ini kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ini anggaran telah berkurang setelah perubahan. Pelaporan kegiatan belum dilaksanakan sehingga realisasi keuangan tidak tercatat	Pada Sub Kegiatan ini telah dilakukan pergeseran belanja pada Anggaran Perubahan, terkait perjalanan dinas untuk kegiatan ini telah berkurang dari yang sudah dianggarkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses dan menunggu untuk di GU kan pada GU berikutnya
4.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 12 kali dengan Capaian 50%, telah tercapai 6 Laporan yang menunjukkan bahwa harmonisasi tingkat kecamatan telah secara rutin dilaksanakan hingga hampir mencapai target yang telah ditetapkan.	Belum ada Realisasi keuangan karena capaian keuangan masih terdapat belanja perjalanan dinas dan makan minum yang belum di SPJ kan sehingga realisasi belum tercatat	Sisa SPJ yang belum di pertanggungjawabkan akan di proses dan menunggu untuk di GU kan pada GU berikutnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pada Sub Kegiatan Ini Target Kinerja 12 kali dengan Capaian 100%, telah tercapai 5 Kali dengan capaian kinerja 41,67% cukup baik mengingat penegakan perda dengan sinergi kepolisian sangat dibutuhkan terkait pelayanan dengan masyarakat yang memberikan keamanan dan ketertiban	Target ditetapkan sebesar Rp. 1.539.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 400.000,- sehingga capaian 63,01%, anggaran pada sub kegiatan ini telah dialihkan ke kegiatan lain guna mengefisiensikan penggunaan anggaran	Sisa anggaran akan di gunakan pada bulan berikutnya
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pada Sub Kegiatan ini pelaksanaan tidak tepat waktu pelaksanaannya dikarenakan adanya kegiatan yang selalu bersamaan target 12 laporan dengan realisasi 9 laporan pada triwulan III	Target keuangan sebesar Rp. 16.742.000,- dengan realisasi Rp. 5.800.000,- sehingga capaian 34,6% menunjukkan tingkat penggunaan anggaran yang cukup stabil sehingga penggunaan anggaran untuk bulan berikutnya masih bias dimaksimalkan	Memaksimalkan anggaran sesuai dengan prioritas kegiatan yang dibutuhkan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Permasalahan Terkait Pencapaian Kinerja (Secara Teknis baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal)	Permasalahan Terkait Realisasi Keuangan	Solusi
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Pada Sub Kegiatan ini untuk dilaksanakan pada TW II dan TW IV kegiatan belum bisa dilaksanakan pada awal tahun sebelum desa menyelesaikan Administra penyusunan keagiatan di desa begitu pada akhir tahun kegiatan di desa selalu terlambat kegiatannya	Target sebesar Rp. 3.824.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.535.000,- capaian 40% tingkat realisasi rendah karena penyusunan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan direalisasikan kegiatannya	Pelaksanaan Penyusunan dan penetapan APDES di Desa harus dilakukan pada Akhir Tahun berjalan dan awal tahun berikutnya anggaran di desa bisa lebih cepat diawal tahun.begitupun pelaksanaan kegiatan di desa
6.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Pada Sub kegiatan target ditetapkan sebanyak 12 desa dengan realisasi sebanyak 3 desa	Pada Sub kegiatan ini pada TW III realisasi keuangan belum berjalan dikarenakan kegiatan pembangunan desa yang masih belum terlaksana sementara menunggu jadwal berikut	Kegiatan Monitoring belum terlaksana masih menunggu kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan BKK di Desa

3.2. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. **3,237,077,434** dengan Realisasi anggaran sebesar Rp **2,009,162,496** dengan capaian **62,07%**. Secara rinci alokasi anggaran beserta realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran dan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Kantor Kecamatan Tomoni

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	100%	78.10%	78.10%	2,782,304,334	1,845,707,074	66.34%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	67.50%	67.50%	9,466,000	5,710,000	60.32%
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	6,196,000	4,140,000	66.82%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	550,000	390,000	70.91%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	550,000	190,000	34.55%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	2,170,000	990,000	45.62%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	46.67%	46.67%	2,062,303,478	1,435,998,857	69.63%
	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	100%	2,046,705,478	1,425,398,857	69.64%
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	8 Laporan	66.67%	15,598,000	10,600,000	67.96%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	50%	50%	9,101,000	5,400,000	59.33%
	- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	9,101,000	5,400,000	59.33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	28%	28%	1,886,000	803,600	42.61%
	- Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	14,898,000	7,760,000	52.09%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	2 Orang	40%	224,719,700	107,931,500	48.03%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	15.88%	15.88%	2,958,500	1,842,000	62.26%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 paket	100%	-	-	0.00%
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	100%	2,434,000	950,000	39.03%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	2 Paket	66.67%	5,867,200	1,807,900	30.81%
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4,020,000	2,020,000	50.25%
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	6 Laporan	50%	117,973,500	56,808,000	48.15%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	978 Laporan	259 Laporan	26.48%	91,466,500	44,503,600	48.66%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	0%	0%	38,000,000	-	0.00%
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	0 Unit	0%	38,000,000	-	0.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	43.75%	43.75%	337,858,156	265,286,257	78.52%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lembar	6 Lembar	50%	11,969,250	5,818,500	48.61%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	18 Laporan	50%	25,008,906	14,467,757	57.85%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	1 Laporan	25%	8,500,000	8,400,000	98.82%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Orang	24 Orang	100%	292,380,000	236,600,000	80.92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	37.58%	37.58%	84,072,000	16,816,860	20.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	1 Unit	8.33%	63,725,000	13,076,860	20.52%
	- Pemeliharaan Mebel	10 Unit	0 Unit	0%	600,000	-	0.00%
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	2 Unit	5.13%	6,775,000	1,680,000	24.80%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	1 Unit	25%	12,972,000	2,060,000	15.88%
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	50%	50%	4,945,000	190,000	3.84%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	50%	50%	4,945,000	190,000	3.84%
	- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	24 Dokumen	12 Dokumen	50%	4,945,000	190,000	3.84%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	100%	100%	422,861,350	155,530,422	36.78%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	62,951,000	24,502,000	38.92%
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	100%	15,666,500	13,194,500	84.22%
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	100%	47,284,500	11,307,500	23.91%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	75%	75%	359,910,350	131,028,422	36.41%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	- Pembangunan Sarana dan Pra sarana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	339,510,350	114,028,422	33.59%
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2 Pokmas	1 Kegiatan	50%	20,400,000	17,000,000	83.33%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	43.75%	43.75%	5,346,950	400,000	7.48%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	45.83%	45.83%	4,007,450	-	0.00%
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5 Laporan	41.64%	1,550,200	-	0.00%
	- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	6 laporan	50%	2,457,250	-	0.00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	41.67%	41.67%	1,339,500	400,000	29.86%
	- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	5 Laporan	41.67%	1,339,500	400,000	29.86%
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	50%	50%	10,217,000	5,800,000	57%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50%	50%	10,217,000	5,800,000	56.77%
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	10,217,000	5,800,000	56.77%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET TAHUNAN	REALISASI s/d TW.II TAHUN 2025	Capaian (%)	TARGET s/d TRIWULAN II (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(6/5*100)
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	32.36%	32.36%	11,402,800	1,535,000	13.46%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%	32.36%	32.36%	11,402,800	1,535,000	13.46%
	-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	24 dokumen	66.67%	3,728,600	1,535,000	41.17%
	- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	7,674,200	-	0.00%
TOTAL		KINERJA TAHUNAN		49.30%	3,237,077,434.00	2,009,162,496	62.07%

3.2. Budaya Kerja Mempengaruhi Pencapaian Organisasi

Budaya kerja merupakan cerminan nilai, sikap, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang baik akan membentuk lingkungan kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, budaya kerja yang positif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Pencapaian kinerja yang baik berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penguatan budaya kerja organisasi. Kinerja yang tercapai sesuai target akan menumbuhkan semangat kerja, motivasi, serta rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap organisasi. Sebaliknya, capaian kinerja yang belum optimal dapat menjadi refleksi bagi organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap disiplin, pola kerja, dan efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, konsistensi pencapaian kinerja menjadi faktor penting dalam menjaga budaya kerja yang produktif dan adaptif.

Dalam upaya memperkuat budaya kerja dan meningkatkan pencapaian kinerja, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu menginternalisasi nilai-nilai dasar **BerAKHLAK** sebagai panduan perilaku kerja, yaitu: **Berorientasi Pelayanan** (memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif), **Akuntabel** (bertanggung jawab dan transparan), **Kompeten** (selalu meningkatkan kapasitas diri), **Harmonis** (membangun kerja sama dan menghargai perbedaan), **Loyal** (setia pada bangsa dan nilai organisasi), **Adaptif** (terbuka terhadap perubahan dan inovasi), serta **Kolaboratif** (bekerja sama untuk hasil terbaik). Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK secara konsisten akan memperkuat budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi hasil, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

BAB I PENUTUP

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, maka pada Tahun 2025 Triwulan II capaian realisasi sudah cukup baik. Adapun realisasi capaian per indikator kinerja utama adalah:

Capaian Indikator sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 90,19 dari target 85, hal ini menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2025 sudah baik melebihi target yang telah ditentukan.

Capaian Indikator sasaran 2 Nilai SAKIP hasil evaluasi internal Inspektorat triwulan I tahun 2025 adalah 68,75 dari target 65. Segala pencapaian tidak terlepas dari kesadaran seluruh jajaran Kantor Kecamatan Tomoni dalam mewujudkan pencapaian sasaran sebagai wujud efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tomoni Tahun Anggaran 2025 Triwulan II disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Semoga laporan yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Tomoni periode selanjutnya.

Tomoni, 7 Juli 2025

Camat Tomoni,



MUHAMMAD JUMARDIN, SE

Pangkat : Pembina Tk. I/ IV.a

NIP : 19721231 200312 1 022